

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim dan Kusufi M.S. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agung Djojosoedarto dan Marselina Djayasinga, *Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD*. Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Jakarta, 2004.
- Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2006.
- Djohermansyah Djohan, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kamaroesid, Herry. *Sistem Administrasi Anggaran Negara*, Mitra Wacana Media, Medan, 2013.
- Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mahsun, Moh Firma Sulistyowati dan Purwanugraha H.A. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga. Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2011.
- Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Saefullah Wiradipradja E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*. (Cetakan ke-2). CV. Keni Media, Bandung, 2016.

Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)*, Setara Press, Malang, 2016,

Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)*, Setara Press, Malang, 2016.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Steiss, Alan W. *Manajemen Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba*. Virginia Polytechnic Institute and State University. New York, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Walidin, W. Saifullah, & Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press, Yogyakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Zulkarnaen. *Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Dokumentasi Lainnya

Agie Zaki Fathul Jamil, *Skripsi*, Pengaturan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Keterlambatan Penetapan APBD DKI 2015), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Amiruddin A. Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Katalosis*, 2015.

- Asshiddiqie, Jimly. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. *Makalah* disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, 2003.
- Bahrin Assidiqi. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Desri Irfandi, Dahlan, Mukhrijal, Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020.
- Fikri Al Amry, *Skripsi*, Fungsi Anggaran DPRD dalam *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Josmagel Harapan Sianturi. *Skripsi*, Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013).
- Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, *Skripsi*, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Nurhasmah, Nadirsyah, Syukriy Abdullah, Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi Eksekutif dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Magister Akuntansi*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol-4, 2015.
- Nurhasmah, Nadirsyah, Syukriy Abdullah, Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi Eksekutif dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Magister Akuntansi*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol-4, 2015.
- Risna, *Skripsi*, Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Schick, Allen. Dapatkah Badan Legislatif Nasional Mendapatkan Kembali Suara yang Efektif dalam Kebijakan Anggaran. *Jurnal OECD tentang Penganggaran*. Vol-1, 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.